

## Bab VII : PENUTUP

### Agenda Pembangunan

Bab ini adalah penutup seluruh uraian dalam buku ini. Sebagai penutup, pembahasan dalam bab ini memberikan penekanan serta membulatkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelum ini dalam rangkuman-rangkuman kesimpulan. Selain itu, bab ini juga sekaligus digunakan untuk mengekspresikan renungan-renungan mengenai pembangunan nasional serta berbagai tantangannya. Karena bersifat renungan, maka kesimpulan ini akan sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap nilai-nilai budaya dan masyarakat di mana dan untuk siapa pembangunan itu berlangsung.

Hampir semua topik terdahulu telah banyak berbicara mengenai globalisasi sebagai arus yang melanda seluruh dunia dan semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat atau bangsa yang dapat menghindar dari arus itu. Setidak-tidaknya semua akan terkena pengaruhnya.

Globalisasi ini dapat diibaratkan sebagai gelombang yang bergerak tidak henti-hentinya, menghanyutkan semua yang dilaluinya. Gelombang ini membawa manusia kepada suatu tahapan baru dalam perkembangan peradabannya. Dunia sedang menuju kepada terbentuknya sistem mondial yang makin menyatu, yang segenap komponennya makin kait-mengait, dorong-mendorong, dan topang-menopang. Komponen-komponen itu dapat berupa masyarakat, bangsa atau negara, tetapi juga dapat berupa kegiatan, seperti kegiatan politik, ekonomi, atau budaya.

Mengenai kecenderungan-kecenderungannya, banyak sudah upaya untuk menerawangnya. Namun, ke mana arahnya dan bagaimana wujudnya, katakanlah dua puluh tahun mendatang, sulit bisa diramalkan, karena begitu cepatnya perubahan itu terjadi.

Alvin Toffler, di antara banyak ahli, lebih dari dua puluh tahun yang lalu, ketika masih pada puncaknya perang dingin jauh sebelum runtuhnya tembok Berlin, telah mengingatkan bahwa dunia sedang memasuki jeram arus pertumbuhan yang cepat. Fajar era globalisasi itu telah mulai tampak yang kela-

hirannya didorong oleh percepatan perkembangan teknologi. Ia meramalkan demikian cepatnya perubahan itu terjadi, sehingga akan mengakibatkan gejala, bukan hanya *culture shock*, melainkan lebih dahsyat dari itu, yang diberinya nama dengan *eufemisme Future Shock* (Toffler, 1971).

Dikatakannya: "*We have in our time released a totally new social force—a stream of change so accelerated that it influences our sense of time, revolutionizes the tempo of daily life, and affects the very way we 'feel' the world around us. .... this acceleration lies behind the impermanence—the transience—that penetrates and tinctures our consciousness, radically affecting the way we relate to other people, to things, to the entire universe of ideas, art and values*".

Salah satu manifestasi globalisasi adalah keterbukaan, yaitu runtuhnya sekat yang membatasi pergaulan antarbangsa. Apakah itu sekat politik, ekonomi, ataupun budaya.

Globalisasi menyebabkan informasi mengalir bebas dari hambatan. Berarti gagasan-gagasan juga bergerak bebas. Bangsa Indonesia harus siap menerima kenyataan bahwa banyak hal yang menjadi keyakinan selama ini akan dipertanyakan dan diuji keabsahannya atau relevansinya. Kita harus sudah memperhitungkan bahwa sistem kenegaraan dan pandangan-pandangan yang melandasinya akan terus-menerus diuji dan ditantang.

Kita tidak bisa menghindari masuknya gagasan-gagasan asing, yang selama ini haram (*anathema*) bagi kita, misalnya istilah liberalisasi. Pernah pada suatu masa, kata *liberal* sama buruknya dengan *komunis* sekarang.

Kita memang dengan kuat berargumentasi bahwa liberalisasi, sebagai bentuk nyata proses globalisasi di bidang ekonomi, bukanlah liberalisme. Akan tetapi, banyak orang sudah menantang dan menanyakan apa bedanya.

Yang jelas, ekonomi nasional akan makin terintegrasi ke dalam ekonomi global. Persaingan nanti bukan lagi antarnegara melainkan antarunit ekonomi/produksi karena dalam ekonomi global pengertian asal-muasal suatu produk akan menjadi kabur dan merupakan rangkaian unit-unit produksi yang mata rantai proses produksinya berada di berbagai penjuru dunia. Di kawasan Asia Pasifik, semua itu akan terjadi pada tahun 2020. Di kawasan Asia Tenggara bahkan lebih cepat lagi, yaitu tahun 2003.

Jelas, bahwa seperti terjadi pada semua bangsa lainnya, arus perubahan ini akan mempengaruhi bangsa Indonesia. Persoalan kita adalah apa artinya semua itu bagi bangsa Indonesia? Oleh karena itu, **agenda pembangunan kita yang pertama** adalah menumbuhkan daya saing agar dapat melanjutkan pembangunan dalam momentum dan laju yang tinggi, dengan memanfaatkan peluang yang terbuka dari proses perubahan besar yang sekarang sedang berlangsung di tengah kehidupan umat manusia. Secara teoretis, perdagangan bebas akan meningkatkan volume aliran modal dan jasa yang akan membawa kemanfaatan ekonomi bagi semua yang terlibat di dalamnya. Deregulasi dan debirokratisasi adalah suatu bagian saja dari upaya ke arah itu. Namun, tidak berarti kita berhenti di situ. Maka, pertanyaan berikutnya adalah, dalam tubuh bangsa kita siapa yang terlibat dalam proses itu, atau siapa yang dapat mengambil manfaatnya?

Di sektor ekonomi modern yang sudah cukup berkembang, kita telah memiliki kelompok-kelompok yang cukup kuat mempunyai peluang untuk berkompetisi. Bahkan

dengan deregulasi dan debirokratisasi, kesempatan berkembang bagi mereka bisa lebih luas lagi.

Yang menjadi masalah bagi kita terutama ialah apakah ekonomi rakyat, yang kita artikan sebagai ekonomi usaha kecil, dapat terlibat di dalamnya dan turut mengambil manfaatnya?

Dalam kondisi seperti sekarang, jelas lapisan terbesar rakyat Indonesia ini tidak akan dapat mengikuti, apalagi memanfaatkan perkembangan ekonomi yang demikian. Selama ini saja, dalam ekonomi nasional yang masih terlindung oleh berbagai perisai, lapisan ekonomi rakyat ini masih jauh tertinggal, apalagi jika harus dihadapkan pada persaingan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa dari luar.

Yang dikhawatirkan adalah terciptanya kesenjangan yang makin melebar yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan dapat mengganggu integritas kita sebagai bangsa. Kita belajar saja dari pengalaman negara-negara lain. Faktor yang paling dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan bangsa Indonesia, bukanlah lagi primordialisme, seperti agama dan suku, karena itu sudah lama kita lewati, melainkan persoalan kesenjangan ekonomi. Betapapun majunya negara kita, antara lain berkat globalisasi, kalau yang maju hanya satu bagian kecil saja, sedangkan lapisan terbesarnya makin jauh tertinggal, ancaman disintegrasi justru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat kita semua sama-sama serba kekurangan.

Oleh karena itu, membangun ekonomi usaha kecil, menghilangkan kemiskinan, mendorong kemajuan wilayah-wilayah yang tertinggal harus menjadi **agenda pembangunan kedua** dalam menghadapi globalisasi. Ditematkannya hal tersebut pada urutan kedua, bukanlah oleh karena nomor dua penting, tetapi semata-mata demi runtunnya pembahasan.

Segegap kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh negara harus ditujukan ke arah membangun pertumbuhan yang serasi dengan pemerataan dan keadilan. Kebijakan-kebijaksanaan ekonomi, baik

makro maupun sektoral dan regional, harus secara terpadu mengupayakan agar ekonomi rakyat yang lemah dan tertinggal itu dapat secepatnya dibangkitkan, sehingga menjadi lapisan ekonomi kecil dan menengah yang tangguh.

Pengalaman di masa yang lalu juga menunjukkan bahwa upaya ke arah itu tidak bisa dilakukan secara kecil-kecilan, misalnya dengan proyek-proyek perintis saja, tetapi harus dengan usaha yang besar dan berdampak besar. Untuk itu, memang diperlukan alokasi sumber daya yang memadai, terutama modal, dan, tidak kalah pentingnya, juga pengetahuan dan keterampilan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu contoh upaya tempat kita mencurahkan hampir setengah triliun rupiah setiap tahun untuk memecahkan masalah kemiskinan pada akar kemiskinan. Upaya itu adalah dengan cara pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal dan pendampingan serta pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk memecahkan lingkaran kemiskinan.

Upaya serupa –dalam skala yang besar– harus kita lakukan juga dalam sektor-sektor lain, dengan memanfaatkan semua perangkat ekonomi yang dimiliki, antara lain dalam bentuk kebijaksanaan, termasuk instrumen-instrumen fiskal dan moneter. Di masa yang lalu upaya serupa ini telah dilakukan, tetapi acapkali kandas karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuannya, atau para pelaksananya tidak melihatnya sebagai misi.

Masalah ekonomi rakyat adalah satu sisi. Sisi lainnya adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sebagai prasyarat dalam membentuk kekuatan bangsa untuk membangun kemajuan dan memantapkan kemandirian. SDM dan iptek adalah penentu daya saing. Di sinilah sebenarnya terletak perlombaan. Kalau globalisasi dianggap sebagai suatu perlombaan, maka yang diperlombakan sebenarnya adalah kualitas SDM dan penguasaan iptek. Oleh karena itu, dalam program-program pembangunan bangsa ini, kedua hal itu harus diberi prioritas yang tinggi. Ini

merupakan **agenda pembangunan ketiga**, dalam mempersiapkan bangsa menghadapi era global. Program-program pemerintah dengan sendirinya amat penting, tetapi masyarakat dan dunia usaha harus turut mencurahkan perhatian dan sumber daya ke arah peningkatan kualitas SDM dan penguatan iptek.

Sekarang kita rasakan perhatian dunia usaha kita masih belum memadai ke arah itu. Untuk itu, mungkin perlu dikembangkan sistem insentif dan disinsentif guna merangsang dunia usaha mengadakan investasi lebih besar dan untuk tujuan jangka panjang dalam SDM dan iptek. Kita harus mengembangkan sektor-sektor dan produk-produk unggulan, sehingga sumber daya terbatas yang kita miliki itu dapat secara lebih optimal digunakan. Secara bertahap kita memperdalam penguasaan produksi di sektor-sektor dan produk-produk tersebut, serta memperluasnya ke sektor atau produk yang lain.

Dengan sendirinya kemampuan membuat saja tidak memadai. Kita juga harus mengembangkan kemampuan pemasaran. Dari pengalaman negara-negara lain yang baru saja masuk tahapan industri, kita menarik pelajaran bahwa upaya menembus pasar dan memenangkan persaingan harus menjadi gerakan bersama, seperti *total football*, bukan hanya sisi produksi, tetapi seluruh sistem harus mendukungnya. Oleh karena itu, sasaran kita pada akhir PJP II bukan hanya menjadi bangsa industri yang kuat, tetapi juga bangsa niaga yang tangguh.

SDM yang berkualitas adalah yang bersikap maju dan berpikir modern, yang produktif dan profesional. Di atas SDM yang demikian itulah kita membangun iptek karena kemampuan iptek bukan hanya tercermin dari peralatan yang dimiliki, melainkan kemampuan kreatif dan inovatif dari manusianya. Maka membangun SDM dan iptek pada hakikatnya sama, dan pada dasarnya keduanya berkaitan dengan masalah budaya.

SDM iptek dan industri, yang akan menjadi tumpuan kita dalam menghadapi persaingan, hanya dapat tumbuh subur dalam

alam budaya yang mendukung, sebagai mediumnya. Dengan demikian, membangun kebudayaan bangsa dan memperkuat ketahanannya, harus menjadi **agenda yang keempat** dalam menghadapi masa yang penuh harapan tetapi juga penuh cobaan di muka kita.

Kemajuan yang ingin kita capai melalui pembangunan ekonomi sebenarnya adalah kemajuan sosial budaya. Seperti dikatakan UUD 1945, pada akhirnya tujuan kita bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, konsep pembangunan kita sebenarnya menetapkan perilaku ekonomi sebagai perilaku sosial budaya yang harus didasari oleh kebudayaan kita. Karena ini merupakan konsep yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat kita, maka konsep itu sendiri adalah suatu konsep budaya yang harus kita kembangkan dan kita mantapkan menjadi nilai-nilai yang hidup pada setiap insan Indonesia.

Sikap budaya yang terbiasa dengan "upaya seadanya" atau "hanya cukup dengan meniru-niru saja" harus diubah menjadi sikap budaya yang mementingkan "upaya mencapai kecanggihan" dan "keunggulan (*excellence*)". Di bidang perdagangan kita harus mampu menjadi wirausahawan yang ulung, di bidang ilmu pengetahuan kita harus menghasilkan ilmuwan yang bertaraf internasional, di bidang teknologi kita harus mempunyai penemu-penemu teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa sendiri dan kemanusiaan, di bidang seni kita harus menghasilkan karya seni yang agung dan dikagumi dunia dan di bidang sastra kita harus dapat menghasilkan karya sastra yang mendunia.

Kualitas SDM, menurut konsep kita, tidak hanya diukur secara materi saja. Pembangunan kita bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, patriotik dan berdisiplin. Dengan demikian, konsep budaya kita memberikan tekanan pada aspek kualitas manusia seutuhnya. Perilaku sosial warga masyarakat kita dalam berbagai bidang haruslah sesuai dengan

konsep budaya tersebut. Hari depan bangsa dan negara kita akan ditentukan oleh mereka yang sekarang "dibentuk" oleh pembangunan dalam paradigma budaya nasional itu.

Jelas kita tidak bisa menghindari terjadinya interaksi antara budaya bangsa kita budaya luar. Interaksi itu dapat membuah hasil yang positif dengan memperkaya budaya bangsa dan mendorong proses modernisasi. Interaksi itu juga akan menjadi pemacu pembaharuan dan merangsang pemikiran yang lebih maju.

Sebaliknya, interaksi tersebut juga dapat membawa dampak yang negatif, bahkan bisa mengguncang masyarakat kita, karena dua hal, yakni *pertama*, bangsa kita belum siap menerimanya, dan *kedua*, secara hakiki bertentangan dengan norma-norma dasar yang membentuk kepribadian.

Menghadapi interaksi serupa ini, ketahanan budaya kita diuji. Di sini secara sungguh-sungguh kita harus mengendalikan wilayah-wilayah *interface* di mana interaksi itu terjadi. Dalam hal yang pertama, perlu ada peredaman terhadap dampak interaksi sampai masyarakat siap menerimanya.

Dalam hal yang kedua, jelas kita harus memasang benteng yang kuat karena mempertahankan nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadian bangsa merupakan masalah yang hakiki bagi tiap bangsa, misalnya, bagi bangsa kita adalah nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kekeluargaan, bukan berarti nepotisme, tetapi mencerminkan semangat kebersamaan, tolong-menolong, solidaritas sosial, dan senasib sepenanggungan. Demikian pula nilai-nilai spiritual yang tidak lekap dan lapuk karena teriknya sinar modernisasi. Membentengi masyarakat dan bangsa kita, tampaknya sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan mendirikan tembok penghalang, tetapi harus dengan penguatan ketahanan budaya kita sendiri. Pendidikan di lingkungan keluarga, di sekolah, dan di masyarakat teramat penting. Di samping itu, media komunikasi harus menjadi benteng pula. Pertimbangan komersial, yang tidak selalu berarti jelek, haruslah disesuaikan

dengan kepentingan kehidupan jangka panjang bangsa ini.

Pendidikan agama membuat benteng yang kokoh pula yang datang dari, dan bersifat intrinsik, dalam pribadi individu dan masyarakat. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah keteladanan. Para pemimpin dan pemuka masyarakat, baik dari kalangan pemerintah maupun organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, pemuka adat maupun ulama, harus memberi suri tauladan bagi masyarakat.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada pembinaan generasi muda, yang amat peka terhadap berbagai pengaruh. Dalam jiwa generasi muda diharapkan tertanam dalam-dalam nilai-nilai dan sikap orang modern, di atas landasan penghayatan terhadap institusi-institusi sosial yang "sakral" seperti agama, negara, keluarga, guru, dan perilaku, serta budi pekerti yang berakar pada kebudayaan bangsa.

Rangkuman nilai-nilai budaya tersebut harus diberi bingkai lembaga-lembaga dan pranata sosial budaya yang tepat, sehingga menjadi satu sistem sosial budaya yang mendukung berkembangnya kemajuan dan kemandirian bangsa. Kesemuanya itu ingin kita bangun dalam mengembangkan sistem sosial budaya Pancasila, yang di satu pihak menjamin kelestarian hakikat jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, di pihak lain senantiasa akrab terhadap pembaharuan.